



laporan kinerja INSTANSI PEMERINTAH

Triwulan I - 2023

BRPPUPP Palembang



Pusat Riset Perikanan

Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

TIM PENYUSUN

KEPALA BRPPUPP

KEPALA SUBBAGIAN UMUM

SUBKOORDINATOR KELOMPOK TATA USAHA

SUBKOORDINATOR KELOMPOK TATA OPERASIONAL

**SUBKOORDINATOR KELOMPOK PELAYANAN
TEKNIS DAN SARANA**

SUBKOORDINATOR KELOMPOK PENYULUHAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BRPPUPP Triwulan I Tahun 2023. LKjIP BRPPUPP disusun dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN – RB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban BRPPUPP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya good governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja BRPPUPP Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai, baik makro maupun mikro serta langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dan program penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil- hasil penelitian dan pengembangan iptek kelautan dan perikanan.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Palembang, 18 April 2023

Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan



Antoni S

Rozi Antoni S, S.Kel

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Tugas dan Fungsi	3
1.4. Keragaman SDM BRPPUP.....	5
1.5. Sistematika Laporan Kerja	6
II Perencanaan Kinerja	
2.1. Rencana Strategis.....	8
2.2. Rencana Kerja Tahunan.....	20
2.3. Perjanjian Kinerja	21
2.4. Pengukuran Kinerja	23
III Akuntabilitas Kinerja	
3.1. Prestasi Indikator Kinerja Tahun 2023.....	26
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	26
3.3. Akuntabilitas Keuangan	53
3.4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya BRPPUPP	54
IV Penutup	
4.1. Capaian Kinerja Utama.....	56
4.2. Permasalahan dan Rekomendasi.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Output dan Pagu Anggaran BRPPUPP TA 2023	20
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRPPUPP Tahun 2023	21
Tabel 3. Indeks Capaian IKU	23
Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023	27
Tabel 5. Capaian IKU 1	29
Tabel 6. Capaian IKU 2	30
Tabel 7. Capaian IKU 3	31
Tabel 8. Capaian IKU 4	32
Tabel 9. Capaian IKU 5	33
Tabel 10. Rincian Kegiatan SMART Fisheries Village	34
Tabel 11. Capaian IKU 6	36
Tabel 12. Capaian IKU 7	37
Tabel 13. Capaian IKU 8	39
Tabel 14. Capaian IKU 9	40
Tabel 15. Capaian IKU 10	43
Tabel 16. Capaian IKU 11	46
Tabel 17. Capaian IKU 12	47
Tabel 18. Capaian IKU 13	48
Tabel 19. Capaian IKU 14	49
Tabel 20. Capaian IKU 15	50
Tabel 21. Capaian IKU 16	51
Tabel 22. Realisasi Anggaran Tahun 2023	53
Tabel 23. Efisiensi Anggaran BRPPUPP Triwulan I	54

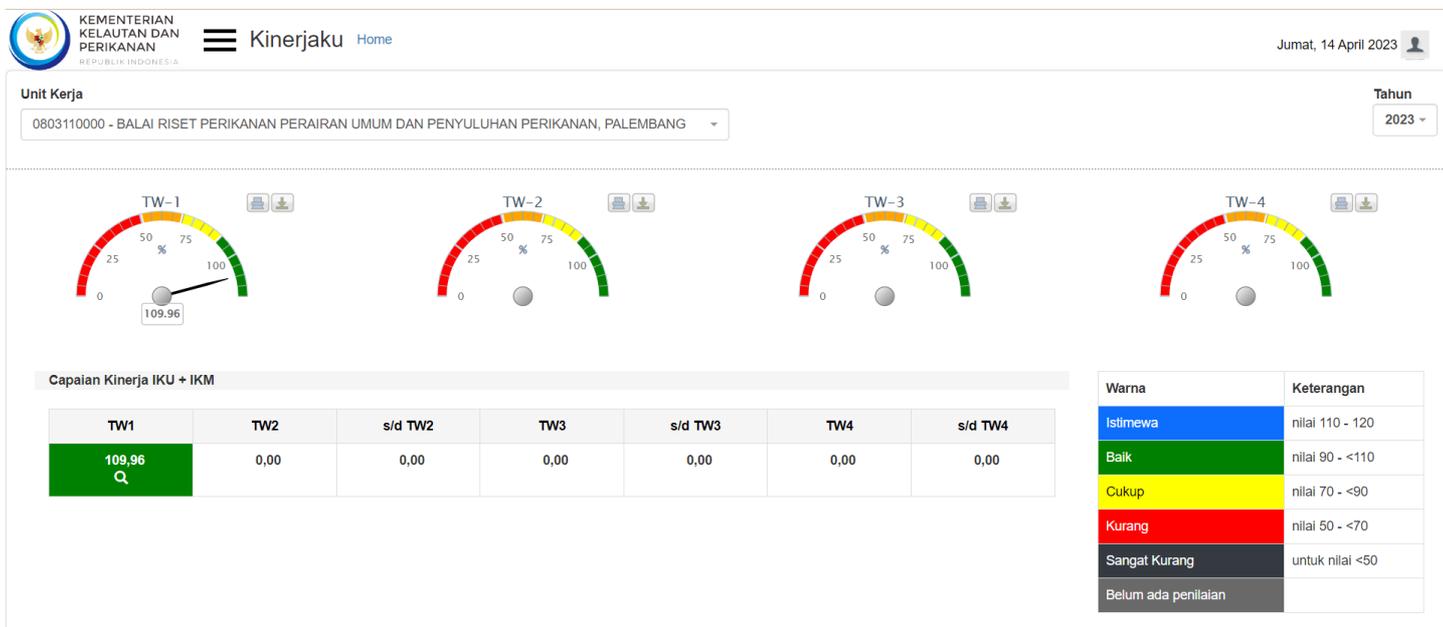
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BRPPUPP	5
Gambar 2. Grafik Komponen Pegawai BRPPUPP Tahun 2023	6
Gambar 2.1 Sasaran Kegiatan BRPPUPP Tahun 2023	12
Gambar 3. Dashboard Kinerja Tahun 2023.....	26
Gambar 4. Nilai Efisiensi BRPPUPP pada aplikasi SMART DJA	54
Gambar 5. Dashboard Kinerja Tahun 2023.....	56

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis BRSDM KP 2020-2024, Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-1 yaitu merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten.

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Triwulan I tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Triwulan I Tahun 2023 sebesar 109,96%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Pada triwulan I dari 17 IKU BRPPUPP terdapat 8 IKU yang telah mencapai target sehingga berstatus hijau di akhir triwulan I tahun 2023, 8 IKU yang telah ada capaiannya adalah:

1. Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPPUPP tercapai sebanyak 991 kelompok dari target tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 5600 kelompok dengan persentase sebesar 110,11%.
2. Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (kelompok) tercapai 2 kelompok dari target tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 250 kelompok dengan persentase sebesar 120,00%.
3. Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di satminkal BRPPUPP (kelompok) tercapai 128 kelompok dari target tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 306 kelompok dengan persentase sebesar 120%.
4. Nilai PNBK BRPPU-PP (Rupiah Miliar) dengan capaian di Triwulan I sebesar Rp10.709.300,- dengan target di tahun 2023 sebanyak Rp27.000.000,-, dengan persentase sebesar 100%
5. Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tercapai sebesar 100% dengan target triwulan I tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 92% dengan persentase sebesar 108,70%
6. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan capaian sebesar 75% dengan persentase 100%
7. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP (%) tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.
8. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%) tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BRPPUPP. BRPPUPP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BRPPUPP Triwulan I Tahun 2023 sebesar **Rp.19,046,951,263,-** atau 23,76% dari pagu anggaran **Rp. 80,156,789,000,-**

Capaian Indikator Kinerja Utama BRPPUPP Triwulan I TA. 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TRIWULAN I	
				TARGET	CAPAIAN
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	900	991
		2	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	0	2
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	100	128
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)	1068	-
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok)	4	-
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	6	Nilai PNBK BRPPU-PP (Rupiah Miliar)	0,010	0,010
		7	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPPU-PP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPPU-PP TA 2022 (%)	≤ 0,5	-
		8	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)	78	-
		9	Nilai PM SAKIP BRPPU-PP (nilai)	76	-
		10	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP (nilai)	92	-
		11	Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	100
		12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75
		13	Nilai IKPA BRPPUPP (nilai)	89	-
		14	Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP (nilai)	82	-
		15	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindak;anjuti BRPPU-PP (kemitraan)	1	-
		16	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP (%)	100	100
17	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)	100	100		

BAB I PENDAHULUAN

- 01 — Latar Belakang**
- 02 — Tujuan**
- 03 — Tugas dan Fungsi**
- 04 — Keragaman SDM BRPPUPP**
- 05 — Sistematika Laporan Kinerja**

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan ke-empat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pusat Riset Perikanan (Pusrisikan) tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) tahun 2020-2024, di mana keduanya mengacu pada Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi KKP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan BRSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM.

Penyusunan Rencana Strategis Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dilakukan sebagai tindak lanjut dari penataan kelembagaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang mengatur pembentukan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) dan didalamnya juga mengatur tentang pembentukan Pusat Riset Perikanan dan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, yang selanjutnya disingkat BRPPUPP, telah berdiri sejak tahun 1969, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Salah satu tugas BRPPUPP

adalah melaksanakan kegiatan riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan di 5 (lima) provinsi yaitu provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu dan Lampung dengan jumlah penyuluh sebanyak 467 orang. Pelaksanaan riset meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjiran, ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan. Kegiatan riset dan penyuluhan BRPPUPP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor KEP.176/MEN/KU.611/2017 tanggal 22 Desember 2016.

1.2. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja BRPPUPP ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan I Tahun 2023.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRPPUPP untuk meningkatkan Kinerjanya.

1.3. Tugas dan Fungsi

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan yang selanjutnya disingkat BRPPUPP, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor KEP.176/MEN/KU.611/2017 tanggal 22 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang Riset Perikanan Perairan Umum Daratan dan Penyuluhan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Perikanan. Institusi ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan Penyuluhan Perikanan yang meliputi 5 (lima) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugasnya, BRPPUPP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;

2. Pelaksanaan Riset Perikanan Perairan Umum Daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;
3. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama Riset Perikanan Perairan Umum Daratan;
4. Pengelolaan prasarana dan sarana riset;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
6. Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

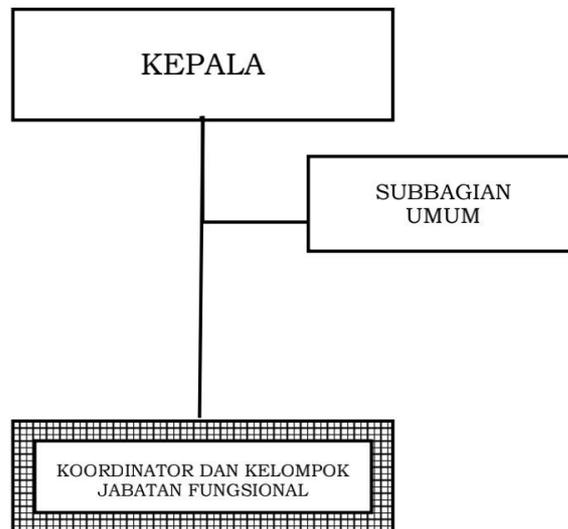
Keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BRPPUPP perlu dievaluasi, sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pasal 3, yaitu penyelenggaraan negara harus mengacu kepada azas proporsionalitas, profesional dan akuntabilitas.

Struktur organisasi BRPPUPP dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi Subbagian umum dan kelompok fungsional, namun saat ini pasca penyetaraan jabatan struktural ke fungsional masih terdapat Subkoordinator dan Pelaksana yang sebelumnya merupakan pejabat struktural eselon IV dan V yaitu:

Subkoordinator Tata Usaha, Subkoordinator Tata Operasional, dan Subkoordinator Pelayanan Teknis dan Sarana, serta Subkoordinator Penyuluhan. Subkoordinator Tata Usaha terdiri atas Pelaksana Urusan Keuangan dan Umum dan Pelaksana Urusan Kepegawaian, Subkoordinator Tata Operasional terdiri dari Pelaksana urusan Program dan Anggaran dan Pelaksana Monitoring dan Evaluasi, Subkoordinator Pelayanan Teknis dan Sarana terdiri atas Pelaksana Urusan Pelayanan Teknis dan Pelaksana Urusan Prasarana dan Sarana, dan Subkoordinator Penyuluhan terdiri atas Pelaksana urusan Kelembagaan Kelompok dan Pelaksana urusan Penyelenggaraan.

Struktur organisasi BRPPUPP tersaji dalam gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN



Gambar 1. Struktur Organisasi BRPPUPP

1.4. Keragaan SDM BRPPUPP

Komposisi pegawai BRPPUPP per Februari 2023 yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Balai (Eselon III), dan 1 Kasubbag Umum dan 4 SubKoordinator Kelompok, yaitu Subkoordinator Kelompok Tata Usaha, subkoordinator kelompok Tata Operasional, subkoordinator kelompok Pelayanan Teknis dan Sarana dan subkoordinator kelompok Penyuluhan, serta 8 pelaksana bidang-bidang. Saat ini BRPPUPP Palembang didukung oleh 611 Pegawai, terdiri atas 3 orang Analis Kebijakan, 7 orang Instruktur, 1 orang Humas, 2 orang Perencanaan, 3 orang Analis Kepegawaian, 5 orang Analis/Pranata Keuangan, 1 orang PBJ, 1 orang Statistisi, 1 orang Arsiparis, 23 orang tenaga Administrasi, 2 orang Pustakawan, 278 orang Penyuluh Perikanan, 163 orang Penyuluh Perikanan Bantu, P3K Penyuluh 42 Orang, 10 orang tenaga PPNPN, 52 orang tenaga Outsourcing. Tenaga PPNPM dan outsourcing berperan dalam membantu kegiatan administrasi, security, Driver, cleaning service, Gardener. Jumlah pegawai BRPPUPP tersaji dalam grafik dibawah ini:



Gambar 2. Grafik Komponen Pegawai BRPPUPP Tahun 2023

1.5. Sistematika Laporan Kerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2023.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang BRPPUPP seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BRSDM
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis BRPPUPP 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan kinerja BRPPUPP Tahun 2023 serta Pengukuran Kinerja.
4. **Bab IV Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya
5. **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 01 — Rencana Strategis**
- 02 — Rencana Kinerja Tahunan**
- 03 — Perjanjian Kinerja**
- 04 — Pengukuran Kinerja**

2.1. Rencana Strategis

Negara Kesatuan Republik Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam, salah satunya adalah perairan umum daratan. Perairan umum di Indonesia tercatat seluas 54 juta ha, terdiri dari 12 juta ha sungai dan rawa, 2,1 juta ha danau (alami dan buatan), dan 39,9 juta ha perairan rawa pasang surut. Perairan umum mempunyai posisi strategis dan berfungsi serba guna, selain dimanfaatkan oleh sektor perikanan juga dimanfaatkan oleh sektor Pekerjaan Umum, perindustrian, pertambangan, kehutanan, pertanian, pariwisata, transmigrasi, perhubungan dan pemukiman (Ilyas *et al*, 1990).

Perairan umum daratan terdiri dari sungai, rawa (rawa banjir, rawa gambut dan rawa pasang surut), estuaria, danau dan waduk serta genangan air lainnya. Sungai merupakan perairan yang mengalir (*lotic water*), memiliki karakteristik mengalir searah dari hulu ke hilir, aliran bagian hulu lebih deras dari pada yang hilir (Ewusie, 1990; Odum, 1993). Sungai-sungai besar banyak tersebar di Sumatera, Kalimantan dan Papua. Keanekaragaman ikan di sungai cukup tinggi sebagai contoh di DAS Kapuas telah ditemukan lebih dari 300 jenis ikan, di DAS Barito lebih dari 110 jenis, sedangkan di DAS Musi lebih dari 200 jenis (Dudley, 1996; Husnah *et al.*, 2008). Tiap tipe ekosistem sungai bagian hulu, tengah dan hilir mempunyai jenis ikan yang khas. Jenis ikan khas di hulu sungai (*up-stream*) sebagai contoh ikan Semah (*Tor douronensis*), bagian tengah (*middle-stream*) yaitu ikan Belida (*Chitala lopis*), dan bagian hilir (*lower-stream*) yaitu Sembilang (*Paraplotosus albilabris*) (Utomo, *et al* 2007). Keanekaragaman jenis ikan penghuni sungai cukup tinggi, namun belum ada data yang akurat untuk mengungkapkan hal ini karena penelitian masih bersifat spasial.

Setelah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) I 2005-2009, pengembangan sektor kelautan dan perikanan pada RPJMN II 2010-2014 semakin menjadi arus utama. Demikian pula dengan sub sektor perikanan tangkap di dalamnya, baik itu perikanan tangkap di laut maupun di perairan umum daratan (PUD). Pelaksanaan pengarusutamaan tersebut mengacu kepada tema RPJMN II sebagaimana telah tercantum dalam RPJPN 2005-2025, yakni "memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, dan memperkuat daya saing perekonomian". Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. RPJMN dimaksud menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan

Perikanan serta Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan diadopsi menjadi Renstra Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

Menindaklanjuti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana penyuluh perikanan yang semula merupakan pegawai daerah dan terhitung bulan Juli 2017 telah dialihkan statusnya menjadi pegawai pusat sebanyak 3.216 orang. Dan BRPPUPP Palembang memiliki penyuluh perikanan sebanyak 483 orang yang tersebar di 5 Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

1. Visi

Dalam mendukung terwujudnya cita-cita nasional dengan kuatnya ketahanan pangan, tingkat kesejahteraan yang meningkat dari masyarakat diperlukan pembangunan fundamental berdasarkan kajian yang terukur dan dapat di implementasikan *stakeholder* perikanan. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sebagai salah satu instansi pelaksana dalam pengkajian sumberdaya dan pemanfaatan perikanan khususnya wilayah daratan bertanggung jawab secara langsung guna memberikan kajian, analisa, data, dan informasi yang kredibel dan dapat dipercaya dalam pembangunan perikanan daratan. Visi BRPPUPP Berdasarkan Visi pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Selain itu juga mengacu visi Presiden 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Dari visi Presiden kemudian ditetapkan visi KKP 2020-2024 untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden. Visi KKP 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan **“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**. Selanjutnya BRSDM KP untuk mendukung visi KKP menetapkan visi BRSDM KP 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong**. Visi Pusat Riset Perikanan adalah **“Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotongroyong melalui riset dan inovasi iptek perikanan”**.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** melalui penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan untuk tercapainya peningkatan SDM KP kompeten untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Adapun keinginan tersebut dituangkan dalam visi Balai Riset Perikanan Perairan Umum Daratan dan Penyuluhan Perikanan sebagai berikut:

“Mewujudkan Sains Dan Teknologi Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan untuk Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Kelestarian dan Pemanfaatan yang Berkesinambungan”

2. Misi

Dalam pencapaian Visi Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan memiliki misi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelitian potensi sumberdaya ikan di perairan umum daratan;
- b. Melakukan penelitian kegiatan perikanan tangkap di perairan umum daratan;
- c. Melakukan penelitian bio-ekologi ikan di perairan umum daratan;
- d. Meningkatkan pemanfaatan praktis hasil penelitian melalui diseminasi, simposium dan workshop kepada stakeholder;
- e. Menyebarkan informasi dan teknologi hasil penelitian dalam berbagai bentuk publikasi ilmiah dan semi ilmiah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1694). BRPPUPP memiliki tugas Melaksanakan kegiatan riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan, dengan fungsi /uraian tugas sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan;
- b. Pelaksanaan riset perikanan perairan umum daratan meliputi ekosistem waduk, ekosistem danau, ekosistem sungai dan rawa banjir, dan ekosistem estuaria, di bidang biologi, ekologi, dinamika dan genetika populasi, lingkungan sumber daya dan plasma nutfah ikan perairan umum daratan;

- c. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset perikanan perairan umum daratan;
- d. Penyusunan materi, metodologi, pelaksanaan penyuluhan perikanan, serta pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta;
- f. Pengelolaan prasarana sarana riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

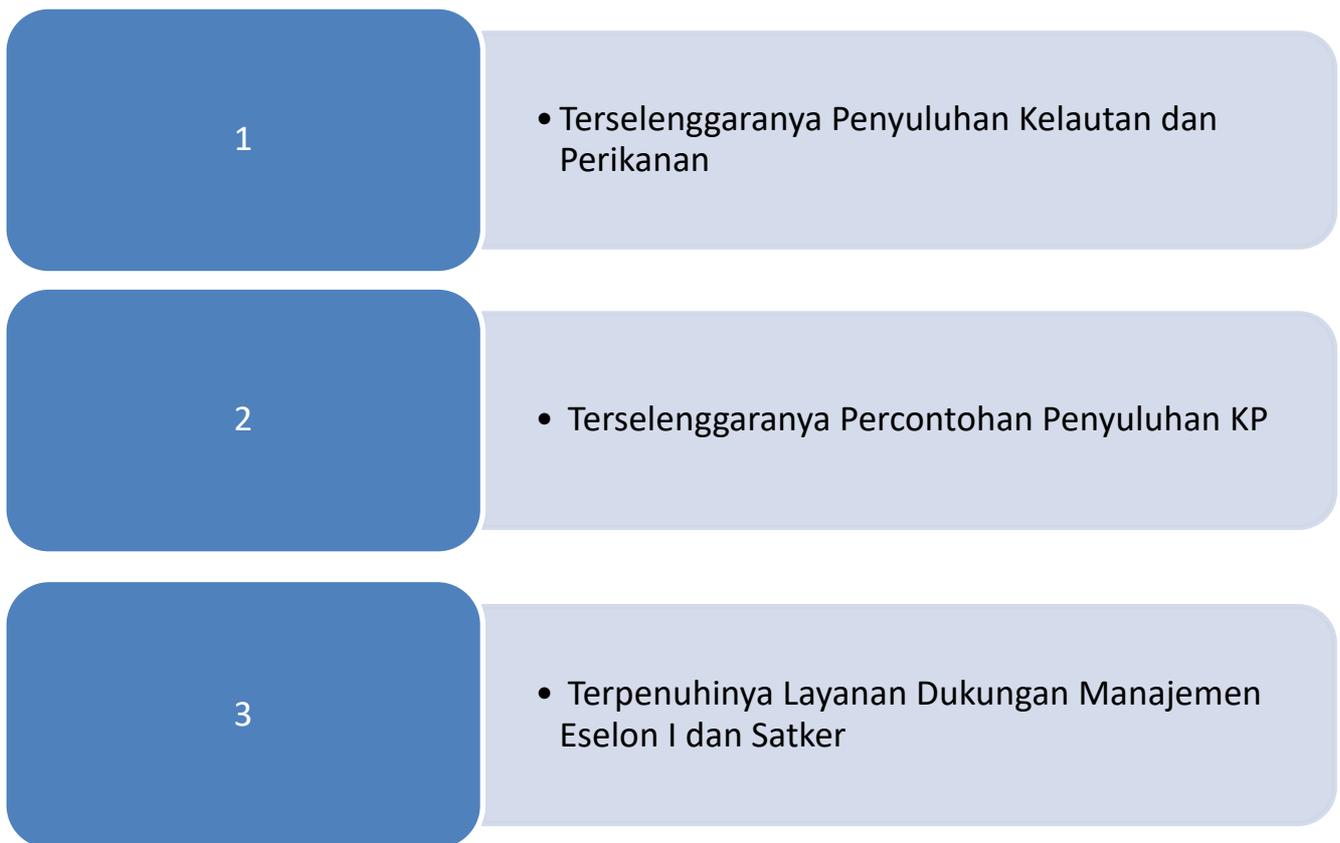
3. Tujuan

Sesuai dengan Visi dan Misi BRPPUPP yang telah dijelaskan tersebut diatas bertujuan untuk:

- a. Melestarikan Sumber plasma nuffah perikanan di perairan umum daratan
- b. Melestarikan dan memelihara kesehatan lingkungan ekosistem perairan umum daratan
- c. Meningkatkan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan
- d. Meningkatkan kesejahteraan nelayan di perairan umum daratan
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM untuk melakukan riset.
- f. Meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana riset
- f. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan perairan umum daratan

4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis BRPPUPP tahun 2023 berdasarkan tujuan yang akan dicapai dibagi dalam tiga Sasaran Kegiatan yaitu:



Gambar 2.1. Sasaran Kegiatan BRPPUPP tahun 2023

A. Sasaran Kegiatan 1

Dalam sasaran kegiatan 1 ini memiliki 4 indikator kinerja yang Menjabarkan misi "Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan", maka sasaran kegiatan pertama (1) yang akan dicapai adalah "Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh, Ditingkatkan dan Dibentuk serta tenaga kerja yang terlibat", dengan indikator kinerja:

- Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok). Dilakukan dengan metode ilmiah yang bisa dipertanggung jawabkan, serta melibatkan intansi terkait dan masyarakat setempat.
- Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok).
- Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok).
- Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang).

B. Sasaran Kegiatan 2

Dalam sasaran kegiatan ini memiliki 1 indikator kinerja. Untuk Sasaran kegiatan ke dua (2) adalah " Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP". Didalam SS-2 ini terdiri dari:

- Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok).

C. Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan ke tiga (3) adalah "Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker" dimana di dalamnya terdapat sepuluh IKU yaitu:

- Nilai PNBK BRPPU-PP (Rupiah Miliar)
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPPU-PP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPPU-PP TA 2022 (%)
- Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)
- Nilai PM SAKIP BRPPU-PP (nilai)
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP (nilai)
- Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)
- Nilai IKPA BRPPUPP (nilai)
- Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP (nilai)
- Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)
- Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP (%)
- Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)

5. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil perhitungan gabungan dari volume produksi yang didaratkan sektor usaha perikanan, sentra pendaratan hasil perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih

sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Sementara itu nilai produksi perikanan tangkap merupakan perhitungan gabungan dari nilai produksi yang didaratkan perusahaan perikanan, pelabuhan perikanan dan hasil estimasi di desa sampel yakni desa perikanan yang terpilih sebagai desa untuk dilakukan kegiatan pengumpulan/pendataan statistik perikanan tangkap, dipilih secara metodologi melalui kerangka survei. Produksi perikanan tangkap diarahkan untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dalam rangka pemenuhan protein hewani sebagai sumber gizi masyarakat yang berkualitas. Untuk komoditas tertentu juga mendukung peningkatan devisa negara melalui ekspor.

Total data produksi yang disajikan dalam kerangka laporan produksi perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersumber dari data perolehan survei dan estimasi Dirjen Perikanan Tangkap. Hasil menggambarkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini karena dominasi data masih merupakan kontribusi besar sektor tangkap perikanan laut. Kenaikan volume produksi perikanan tangkap periode 2010-2014 rata-rata sebesar 4,52% per tahun, yaitu 5.384.418 ton pada tahun 2010 menjadi 6.200.180 ton pada tahun 2014. Produksi tetap didominasi perikanan tangkap di laut yaitu sebesar 5.779.990 (93,22%) sedangkan produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan sebesar 420.190 (7,27%).

Sementara itu, capaian nilai produksi perikanan tangkap tahun 2014 sebesar Rp 108,53 triliun, terdiri dari nilai produksi perikanan tangkap di laut sebesar Rp 99,90 triliun dan perairan umum daratan sebesar Rp 8,62 triliun. Nilai produksi perikanan tangkap selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 10,60% per tahun. Kenaikan terbesar disumbangkan dari perikanan tangkap di perairan laut.

Terus meningkatnya hasil produksi tangkap sektor perikanan pedalaman/perairan umum dengan rata-rata 9,52% pertahun menjadi perhatian khusus. Di mana perikanan perairan umum sangat tergantung dengan wilayah tangkap yang juga digunakan untuk banyak kepentingan. Kegiatan penangkapan lestari yang berbasis dengan kelestarian sumberdaya ikan menjadi konsen penting dalam keberlanjutan perikanan perairan umum itu sendiri.

Keberadaan SDM KP yang kompeten memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peranan strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Untuk mempercepat proses alih teknologi dan memperkuat kapasitas kelompok pelaku utama/pelaku usaha, pada tahun 2017 terdapat 5.783 orang Penyuluh Perikanan yang terdiri atas 2.500 orang Penyuluh Perikanan bantu, 3.283 orang penyuluh PNS, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai tindaklanjut dari amanah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi personel, pendanaan, prasarana dan dokumen (P3D), maka sejak Juli 2017 seluruh Penyuluh Perikanan pengangkatan daerah secara status berubah menjadi Penyuluh Pusat. Terhitung mulai 01 Januari 2018 penyuluh perikanan secara administrasi dibagi menjadi 9 Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) yang tersebar di Indonesia.

b. Permasalahan

• Degradasi Lingkungan

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya tingkat kesejahteraan berdampak pada perubahan tata guna lahan/perairan yang mempengaruhi mutu lingkungan habitat ikan, menyempitnya kawasan perikanan tangkap, rusaknya tempat pemijahan (*spawning ground*), pencemaran bahan beracun, bahkan terganggunya ruaya ikan. Perubahan iklim global baik pemanasan, pendinginan ataupun perubahan siklus musim hujan-kemarau juga akan mempengaruhi siklus hidup ikan.

• Penangkapan yang tidak bijaksana

Meningkatnya jumlah penduduk dan pengguna wilayah perairan umum menjadikan tingkat pemanfaatan meningkat. Salah satunya adalah kegiatan penangkapan yang diperuntukan baik untuk peruntukan konsumsi rumah tangga atau komersial perdagangan. Tingkah laku penangkapan yang semakin intensif mendorong masyarakat berlomba mendapatkan produksi maksimal yang sudah

tidak berimbang dengan sumber daya yang tersedia. Hal ini menjadikan timbul kegiatan penangkapan yang membahayakan, baik untuk nelayan itu sendiri dan sumber daya ikan ke depan. Kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak bijaksana yaitu tangkap lebih maupun penggunaan alat tangkap berbahaya, menggunakan bahan peledak dan beracun akan berdampak terhadap keberlanjutan sumber daya ikan. Kegiatan penangkapan merusak juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan baik secara permanen atau sementara, baik menimbulkan dampak yang dapat direduksi atau tidak tereduksi.

- **Persaingan pemanfaatan perairan umum**

Perairan umum merupakan perairan multi guna yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor pembangunan (multisektor) sehingga dapat terjadi persaingan dalam pemanfaatan yang didasarkan atas kepentingan masing-masing sektor. Dampak yang mungkin terjadi meliputi reklamasi/pengeringan rawa untuk pertanian, reklamasi untuk pemukiman, pembuatan bendungan, dan pembuangan limbah baik dari kegiatan rumah tangga, pertanian, pariwisata maupun industri yang semuanya dapat mengganggu kehidupan ikan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan yang dampaknya dapat diklasifikasikan menjadi a). Tingkat tekanan tinggi, b) Tingkat tekanan sedang, c). Tingkat tekanan rendah, dan d). Dampak yang belum kelihatan nyata.

- **Tingkat tekanan tinggi**

Indikator perairan mendapat tekanan tinggi yaitu ada pencemaran bahan organik dan anorganik di atas ambang batas mutu air; ditandai terjadi kematian ikan yang berulang kali, alih fungsi lahan kelihatan jelas; di sekitar perairan banyak terdapat industri dan perumahan penduduk, mengalami pendangkalan, sulit mendapatkan ikan asli, profesi nelayan banyak beralih ke profesi lain, hasil tangkapan hanya untuk keperluan rumah tangga atau pasar lokal. Contoh perairan umum mendapat tekanan tinggi adalah Sungai Bengawan Solo, Sungai Berantas, Sungai Citarum, Waduk Cirata, dan Danau Rawa Pening.

- **Tingkat tekanan sedang**

Perairan yang mendapat tekanan sedang ditandai pencemaran bahan organik dan anorganik secara temporal dan parsial pada bagian perairan tertentu, terjadi

dampak kematian ikan namun tidak lama kemudian baik kembali, alih fungsi lahan sudah kelihatan pengaruhnya, pengelolaan oleh kearifan lokal masih ada, masih banyak jenis ikan asli namun populasinya cenderung menurun, ada jenis ikan sudah langka bahkan punah, dan masih dijumpai nelayan tetap yang kehidupannya tiap hari mencari ikan dimana hasil tangkapan di samping untuk keperluan sendiri juga dipasarkan ke luar daerah baik dalam bentuk segar maupun olahan. Contoh PUD yang SD ikan sudah mendapat tekanan sedang antara lain Sungai Musi, Sungai Batanghari Jambi, Sungai Barito, Waduk Gajah Mungkur, Waduk Kedung Ombo, Danau Laut Air Tawar, Danau Toba, dan Danau Maninjau.

- **Tingkat tekanan rendah**

Perairan mendapat tekanan rendah ditandai pencemaran bahan organik dan organik yang baru sedikit, alih fungsi lahan mulai kelihatan pengaruhnya, jauh dari perkotaan, masih banyak jenis ikan asli namun sudah terjadi penurunan populasi pada jenis tertentu, masyarakat yang tinggal di perairan tersebut sebagian besar berprofesi sebagai nelayan tetap, hasil tangkapan bukan hanya untuk keperluan sendiri namun juga dipasarkan ke luar daerah dalam bentuk segar maupun olahan, dan pengelolaan sumber daya ikan dilakukan berdasarkan kearifan lokal. Contoh perairan yang mendapat tekanan rendah yaitu kawasan Danau Sentarum Kalimantan Barat, Waduk Koto Panjang, dan Waduk Riam Kanan.

- **Dampak tekanan belum kelihatan nyata**

Sangat sedikit perairan yang tekanannya belum kelihatan nyata, umumnya terletak di daerah pedalaman, jauh dari sumber pencemaran, kekayaan jenis ikan asli masih tinggi, bahkan masih ditemukan ikan yang tergolong langka, dikelola ketat berdasarkan peraturan adat setempat secara turun menurun, dan seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar perairan merupakan nelayan tetap, contohnya di Danau Belaram dan Danau Empangau, Kalimantan Barat.

- **Ketersediaan dan kompilasi data yang valid pengelolaan perikanan masih terbatas.**

- Pencatatan data masih terpisial dan terpisah belum terintegrasi dan belum ada platform untuk pencatatan data PUD
- Stakeholder PUD terdiri dari usaha perikanan kecil yang sangat banyak jumlahnya dan hasilnya banyak yang dikonsumsi secara mandiri.
- Perikanan PUD lebih banyak bersifat parttime job dibanding pekerjaan utama.

- Hasil dari perikanan PUD kecil dan biasanya Undervalue.
- Perikanan PUD didominasi oleh masyarakat kurang mampu dan berpendidikan kurang.

- **Penyuluhan Perikanan**

Aspek ketenagaan penyuluh perikanan, dimana Penyuluh Perikanan sangat berperan dalam pengenalan potensi wilayah dan sosial budaya, serta kondisi pelaku utama dan pelaku usaha bidang perikanan beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- i. Jumlah Penyuluh Perikanan yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang akan disuluh;
- ii. Masih terjadi alih tugas penyuluh perikanan PNS menjadi jabatan lainnya; Kompetensi sebagian penyuluh perikanan masih belum sesuai kebutuhan di lapangan;
- iii. Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota potensi perikanan;
- iv. Penyuluh perikanan masih sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
- v. Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan (diklat fungsional dan teknis) masih kurang.

Aspek Penyelenggaraan Penyuluhan, antara lain:

- i. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
- ii. Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia;
- iii. Kualitas dan kuantitas (jumlah dan penyebaran) penyuluh perikanan masih belum memadai;
- iv. Penyelenggaraan penyuluhan sebagian polivalen, jejaring kerja terbatas dan penyebarluasan teknologi dari sumber ke pengguna teknologi belum berjalan secara efektif;
- v. Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan perikanan masih terbatas dalam aksesibilitasnya;
- vi. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
- vii. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas;

- viii. Batasan peran pemerintah daerah belum jelas, terutama terkait penyelenggaraan penyuluhan pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2.2. Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BRPPUPP Tahun 2023 menetapkan 3 program yaitu Pendidikan dan pelatihan vokasi, Riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan Dukungan Manajemen dengan pagu anggaran Rp. 80,156,789,000,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Output dan pagu anggaran 2023

KODE	OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN
2375	PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		9,908,460,000
2375.DDA.001	Inovasi yang diterapkan sebagai percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan	1 produk	500,000,000
2375.QJA.001	Teknologi Kelautan dan Perikanan yang diuji Kelayakannya	3 Produk	1,500,000,000
2375.QDD.001	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dari penyuluh KP	5.600 Kelompok	7,908,460,000
2378.EBA	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		70,248,329,000
2378.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	21,650,000
2378.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	46,743,000
2378.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	336,286,000
2378.EAA.994	Layanan Perkantoran	1 layanan	69,554,565,000
2378.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	53 Orang	73,340,000
2378.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	82,035,000
2378.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	103,710,000
2378.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	30,000,000
	TOTAL		80,156,789,000

2.3. Perjanjian Kinerja

Rincian dan target Perjanjian Kinerja pada tahun 2023 di sajikan sebagaimana pada Tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BRPPUPP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP BRPPU-PP (Rupiah Miliar)	0,027
		2	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPPU-PP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPPU-PP TA 2022 (%)	≤ 0,5
		3	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)	78
		4	Nilai PM SAKIP BRPPU-PP (nilai)	76
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP (nilai)	92
		6	Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92
		7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		8	Nilai IKPA BRPPUPP (nilai)	89
		9	Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP (nilai)	82
		10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)	1
		11	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP (%)	100

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	5600
		2	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	250
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	306
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)	1068
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok)	4
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker Lingkup BRPPUPP	6	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)	100

2.4. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BRSDM Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Indeks capaian IKU

Baik	Seda	Buruk
Indeks Capaian > 100 %	Indeks Capaian = 100%	Indeks Capaian < 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Scores Card (BSC)*.

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRPPUPP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja BRPPUPP yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Perintah Kepala BRPPUPP NOMOR: K.27/BRSDM-BRPPUPP/TU.110/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang tentang Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusun laporan kinerja Instansi Pemerintah BRPPUPP. Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari pejabat struktural eselon IV dan V serta staf yang mewakili.

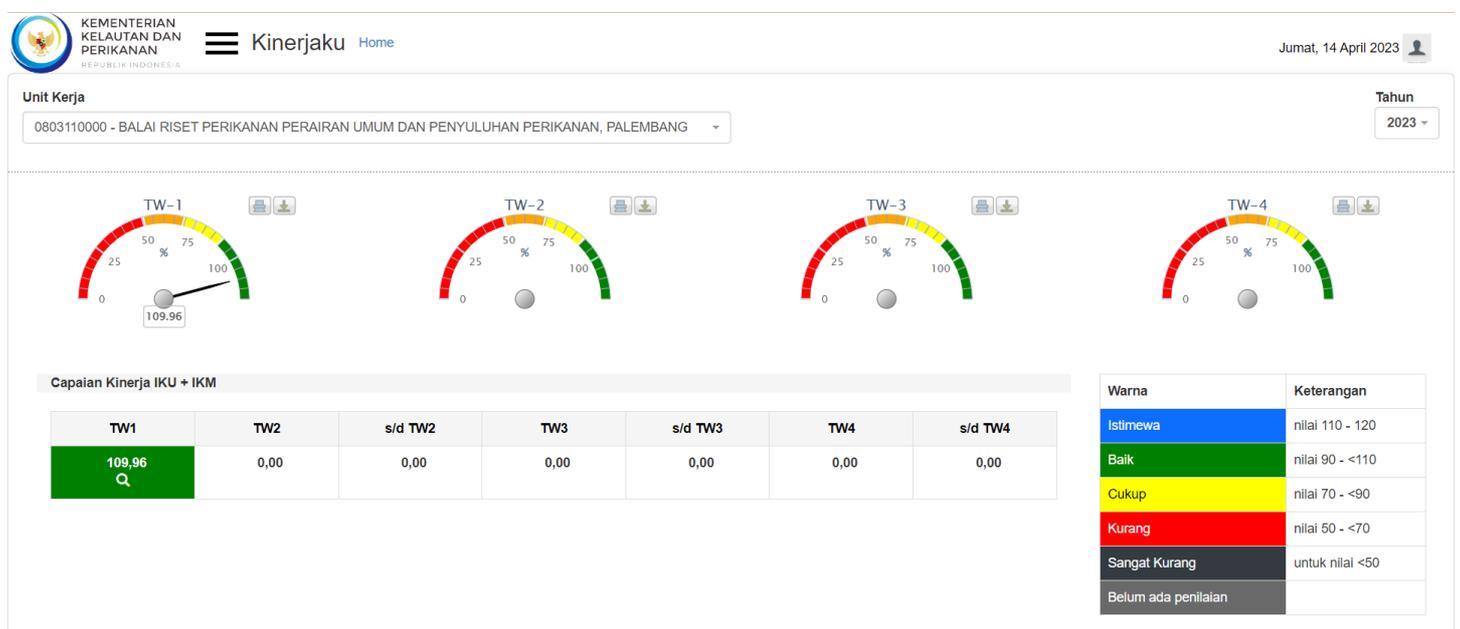
Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Kepala BRPPUPP. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, seksi Tata Operasional BRPPUPP merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 01 — Prestasi Indikator Kinerja TA 2023**
- 02 — Evaluasi dan Analisis Kinerja**

3.1. Prestasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP Triwulan I Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Tahun 2023 sebesar 109,96% per 14 Januari 2023, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 3. Dashbord Kinerja Triwulan I Tahun 2023 BRPPUPP

Selama tahun 2023, dari target 17 IKU BRPPUPP terdapat 8 IKU yang telah mencapai target di akhir Triwulan I tahun 2023, sehingga berstatus hijau.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi BRPPUPP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BRPPUPP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2023 dapat tercapai.

Tabel. 4. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW I		%
			TARGET	CAPAIAN	
1	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	5600	900	991	110,11
2	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	250	0	2	120
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	306	100	128	120
4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)	1068	-	-	-
5	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok)	4	-	-	-
6	Nilai PNBK BRPPU-PP (Rupiah Miliar)	0,027	0,010	0,010	100
7	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPPU-PP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPPU-PP TA 2022 (%)	≤ 0,5	-	-	-
8	Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)	78	-	-	-
9	Nilai PM SAKIP BRPPU-PP (nilai)	76	-	-	-

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	TW I		%
			TARGET	CAPAIAN	
10	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP (nilai)	92	-	-	-
11	Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	92	92	100	108,70
12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	75	75	100
13	Nilai IKPA BRPPUPP (nilai)	89	-	-	-
14	Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP (nilai)	82	-	-	-
15	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)	1	-	-	-
16	Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP (%)	100	100	100	100
17	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)	100	100	100	100

SASARAN KEGIATAN 1 :

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 1

Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh Perikanan tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari pembinaan masyarakat diwilayahnya.

Adapun cara pengukuran untuk IKU ini yaitu Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah disuluh disusun profil kelompoknya sesuai pedoman penyusunan profil.

Tabel 5. Capaian IKU Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)

SS 1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan								
IKU 1	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)								
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024				
	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
	2671	900	991	110,11	-62,89	5600	110,11	-	-

Pada Triwulan I tahun 2023 capaian indikator kinerja ini telah mencapai 110,1% dari target yang ditetapkan. Realisasi yang didapat adalah sebesar 991 dengan target 900. Pada periode yang sama di tahun 2022, indikator ini telah tercapai sebesar 2671 dengan jumlah target yaitu 2500. Dilihat dari jumlah realisasi dan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi pada Triwulan I tahun 2023 cenderung lebih rendah namun dengan angka tersebut capaian telah terpenuhi sebesar 110,11% yang artinya realisasi yang dicapai sudah melebihi target yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyuluh perikanan SATMINKAL BRPPUPP sangat baik dan mengalami peningkatan kinerja di tahun 2023. Untuk realisasi anggaran IKU ini sebesar Rp 1.588.906.837(20,45%) dengan pagu Rp 7.768.460.000

Indikator Kinerja 2

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelasnya setelah mendapatkan pendampingan penyuluhan dengan kriteria sesuai Kep Men no 14 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dimana pengukuhan dilakukan oleh Kepala desa/lurah, camat, bupati/walikota

dan atau Kepala Dinas perikanan setempat sesuai dengan kriteria kelompok yang dikukuhkan, dan /atau; Jumlah kelompok yang telah mendapat pendampingan dan penilaian kelas, dan dalam proses penetapan.

Adapun pengukuran untuk IKU ini yaitu menghitung jumlah kelompok pelaku utama/usaha KP yang meningkat kelasnya dan memenuhi kriteria peningkatan kelas (kelas pemula ke madya, kelas madya ke utama) dari Jumlah Kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian serta dalam proses penetapan, diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Tabel 6. Capaian IKU Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)

SS 1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan								
IKU 2 Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)								
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap target 2023	Target 2024
0	0	2	120,00	100%	250	120,00	-	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator ini pada triwulan I tahun 2023 telah mendapat realisasi sebanyak 2 kelompok dari target yang ditetapkan yaitu 0 kelompok, sehingga persentase capaian untuk indikator ini sebesar 120,00%. Jika dibandingkan dengan jumlah realisasi pada periode yang sama di tahun 2022, untuk indikator ini mengalami kenaikan dimana realisasi pada tahun 2022 sebanyak 0 kelompok. Namun demikian apabila dilihat dari jumlah target tahun 2023 yaitu sebesar 250 kelompok, capaian pada tahun 2023 sebanyak 2 dan memperoleh persentase capaian sebesar 120,00%.

Indikator Kinerja 3

Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan

Pelaku Utama Perikanan. Dalam proses penumbuhannya Penyuluh melibatkan unsur pemerintah daerah dan atau Kepala Dinas Perikanan setempat.;

Adapun cara pengukuran IKU ini yaitu Hitung Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang dibentuk/ ditumbuhkan dan memenuhi kreteria pembentukan kelompok dan Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang telah dilakukan pendampingan dan pembentukan kelompok serta dalam proses pengukuhan diperiode akhir tahun yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Tabel 7. Capaian IKU Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)

SS 1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan								
IKU 3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)								
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024				
	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
	195	100	128	120,00	-34,35	306	120,00	-	-

Berdasarkan tabel diatas pada triwulan I tahun 2023 tahun 2023 capaian indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai 128 kelompok dari target sebesar 100 kelompok. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, walaupun memiliki jumlah capaian yang tidak sebanyak pada capaian triwulan I tahun 2022 namun realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan dikarenakan jumlah capaian yang melebihi target dengan persentase capaian yaitu 120,00%. Capaian yang telah melebihi target ini menunjukkan kinerja penyuluh SATMINKAL BRPPUPP sangat baik.

Indikator Kinerja 4

Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran

produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung di lingkup BRSDM diantaranya : Penyuluh Perikanan Bantu, Penyuluh Swadaya, UMKM yang disuluh, dan P2MKP

Tabel 8. Capaian IKU Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)

SS 1		Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan						
IKU 4		Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)						
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024
-	1068	-	-	-	1068	-	-	-

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru di BRPPUPP. Untuk capaian indikator kinerja di akhir tahun 2023 yaitu sebanyak 1068 orang yang menjadi tenaga kerja yang terdaftar, dengan persentase sebesar 120,00%.

SASARAN KEGIATAN 2 :

Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 5

Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok),

Merupakan indikator yang menunjukkan salah satu metode penyuluhan dalam bentuk percontohan penyuluhan KP di lokasi percontohan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan hasil inovasi teknologi kelautan perikanan tepat guna. Pemilihan lokasi percontohan melalui tahap koordinasi dengan pemerintah setempat dan proposal percontohan telah disetujui oleh Pusat pelatihan dan Penyuluhan sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pelaksanaan percontohan.

Adapun cara pengukuran untuk IKU ini yaitu menghitung jumlah percontohan penyuluhan KP yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman percontohan.

Tabel 9. Capaian IKU Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok)

SS 2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP							
IKU 5	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok)							
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
-	-	-	-	-	4	-	-	-

Untuk indikator kinerja percontohan target di Tahun 2023 sebanyak 4 kelompok dan untuk capaian kinerja akhir periode tahun 2023 sebanyak 4 kelompok. Serta realisasi TW I IKU ini sebesar Rp 10.555.000 (1%) dengan pagu Rp 2.000.000.000

Adapun progress kegiatan percontohan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Rincian Kegiatan SMART Fisheries Village

No	Kegiatan	Tanggal	Ket
1.	Audiensi dengan Bupati Kab. Kaur dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat	3 Februari 2023	

No	Kegiatan	Tanggal	Ket
2.	Melakukan kunjungan ke Desa Linau dan pengenalan SFV	3 Februari 2023	
3.	Identifikasi Potensi Perikanan di Kab. Kaur	26 Februari – 1 Maret 2023	

SASARAN KEGIATAN 3 :

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker

Indikator Kinerja 6

Nilai PNBP BRPPU-PP (Rupiah Miliar)

Definisi dari IKU ini yaitu Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBP : pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), pelayanan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.

Dasar hukum :

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP

b. PP Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan PNBP

c. PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

d. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
 Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 PMK 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN
 PMK 155 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan PNB

Formula :

Data Realisasi Pendapatan dari aplikasi OM SPAN per tanggal 10 bulan berikutnya/surat
 penyampaian realisasi PNB dari Kepala Satker ke Pusat

Tabel 11. Capaian IKU Nilai PNB BRPPU-PP (Rupiah Miliar)

SS 3		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker						
IKU 6		Nilai PNB BRPPU-PP (Rupiah Miliar)						
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024
-	0,010	0,010	100,00	-	0,027	100	-	-

Untuk realisasi indikator kinerja PNB capaian di triwulan I tahun 2023 sebesar 0,010, dengan target 0,010 dan persentase sebesar 100%.

Indikator Kinerja 7

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPPU-PP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPPU-PP TA 2022 (%)

Definisi IKU ini yaitu nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHK) BPK atas laporan keuangan (LK) BRPPUPP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

UKURAN

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA. 2022 (audited) tidak melebihi $\leq 0,5\%$ dari total realisasi anggaran Unit Eselon 3 Tahun 2022.

Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Batas tertinggi persentase} = \frac{\text{Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA 2020}}{\text{Realisasi RIIL TA 2020}} \times 100\%$$

Tabel 12. Capaian IKU Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPPU-PP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPPU-PP TA 2022 (%)

SS 3									
Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker									
IKU 7									
Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPPU-PP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPPU-PP TA 2022 (%)									
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024				
	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
-	-	-	-	-	-	<0,5	-	-	-

Untuk indikator ini perhitungan capaiannya akan ada pada akhir tahun 2023.

Indikator Kinerja 8

Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP (indeks)

Definisi IKU ini antara lain:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2019).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2019 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatir Sipil Negara.

IKU Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari 4 komponen dengan bobot sebagaimana tersebut di bawah ini:

- A. Kualifikasi (Bobot 25%)
- B. Kompetensi (Bobot 40%)
- C. Kinerja (Bobot 30%)
- D. Disiplin (Bobot 5%)

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/Sarjana Muda (SM);
- e. Pendidikan D-2 (Diploma-Dua)/D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma- Satu)/ SLTA Sederajat; dan Pendidikan di bawah SLTA.

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi:

- a. Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional;
- b. Diklat Teknis;
- c. dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara,

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Struktural	Pejabat Fungsional	Staf
	<i>Diklat Struktural</i>	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	<i>Diklat Fungsional</i>	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	-	0	-
	<i>Diklat 20 JP</i>	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	0	0
	<i>Seminar</i>	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP ***)	Nilai SKP	Nilai PPKP
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai Bobot 5 %
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

1. Kualifikasi dihitung dari kondisi pendidikan terkini dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
2. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
 - Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, misalkan Pejabat Eselon I Tidak Pernah melaksanakan Diklatpim Tingkat I maka pegawai tersebut nilainya 0;
 - Diklat Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar dihitung sejak 5 tahun terakhir, apabila dalam kurun waktu tersebut Pernah melaksanakan diklat dan seminar maka nilai

kompetensi pegawai tersebut yaitu 15 dan 10 untuk Struktural dan Jabfung serta 22,5 dan 17,5 untuk staf;

- Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP dan di kolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP);
 - Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin dan diupdate pada aplikasi SIMPEG
- Berdasarkan bobot penilaian Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$\text{Nilai IPA BRPPUPP} = \frac{\sum \text{Nilai IPA Pegawai BRPPUPP}}{\sum \text{Pegawai BRPPUPP}}$$

Nilai IPA Pegawai BRPPUPP adalah total nilai IPA pegawai BRPPUPP dibagi total pegawai BRPPUPP dengan perhitungan masing-masing sebagaimana tersebut di bawah ini:

$$\text{Nilai IPA Pegawai Struktural} = (\text{kualifikasi} \times 40\%) + ((\text{diklatpim} + \text{diklat 20JP} + \text{seminar})/3 \times 40\%) + (\text{kinerja} \times 30\%) + (\text{disiplin} \times 5\%)$$

$$\text{Nilai IPA Pegawai JF} = (\text{kualifikasi} \times 40\%) + ((\text{diklat fungsional} + \text{diklat 20JP} + \text{seminar})/3 \times 40\%) + (\text{kinerja} \times 30\%) + (\text{disiplin} \times 5\%)$$

$$\text{Nilai IPA Pegawai JFU} = (\text{kualifikasi} \times 40\%) + ((\text{diklat 20JP} + \text{seminar})/2 \times 40\%) + (\text{kinerja} \times 30\%) + (\text{disiplin} \times 5\%)$$

Bukti capaian akhir antara lain:

- Data Tingkat Pendidikan (diambil dari data dasar pada Aplikasi Simpeg Online KKP)
- Data Kompetensi dasar (diambil dari data dasar pada Aplikasi Simpeg Online KKP)
- Data SKP (diambil dari data dasar pada Aplikasi e-SKP KKP)
- Data Hukuman Disiplin (diambil dari data dasar pada Aplikasi Simpeg Online KKP)

Tabel 13. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN BRPPUPP (indeks)

SS 3 Terpenuhi Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker									
IKU 8 Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP (indeks)									
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024				
	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
-	-	-	-	-	-	78	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Indeks Profesionalitas ASN lingkup BRPPUPP perhitungan nilainya pada semester I tahun 2023 dengan target sebesar 78.

Indikator Kinerja 9

Nilai PM SAKIP BRPPU-PP (nilai)

Definisi IKU ini yaitu Nilai PM SAKIP Level III BRSDM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Nilai PM SAKIP Unit Level III merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon III lingkup BRSDM. Unit Kerja level III lingkup BRSDM terdiri Sekretariat BRSDM, Pusat Riset Kelautan, Pusat Riset Perikanan, Pusat Pendidikan KP, Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, dan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Dengan cara perhitungan:

Nilai PM SAKIP Level III lingkup BRSDM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim SAKIP BRSDM, Kategori nilai PM SAKIP Level II lingkup BRSDM yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup (memadai)
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Bukti data dukungnya berupa:

- (1) Surat resmi hasil penilaian AKIP Satker uji petik Itjen.
- (2) Hasil Penilaian Mandiri Satker dan hasil verifikasi Tim SAKIP BRSDM

Tabel 14. Capaian IKU Nilai PM SAKIP BRPPU-PP (nilai)

SS 3		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker						
IKU 9		Nilai PM SAKIP BRPPU-PP (nilai)						
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Targe t 2024
-	-	-	-	-	76	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Nilai PM SAKIP BRPPU-PP (nilai) perhitungan nilainya pada akhir tahun 2023 dengan target sebesar 76. IKU ini termasuk baru ada di tahun 2023.

Indikator Kinerja 10

Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPU-PP (nilai)

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK

A. Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi :

PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW IV

Jenis Dokumen yang dibutuhkan		Keterangan
1	Perjanjian Kinerja*	Revisi terakhir jika ada
2	Manual IKU	Revisi terakhir jika ada
3	Rincian Target IKU*	Revisi terakhir jika ada
4	Rencana Aksi*	Khusus level 2
5	LKJ/LCK Triwulan I*	LCK bisa diambil pada aplikasi kinerjajaku
6	LKJ/LCK Triwulan II*	
7	LKJ/LCK Triwulan III*	
8	Data dukung LKJ/LCK Tw III	Cek per IKU

Keterangan:
* Dokumen ditandatangani

Nilai Aspek Kepatuhan = Bobot 30% X Nilai total dokumen

$$\text{Nilai Total Dokumen} = \frac{\text{dokumen yang ada}}{\text{total dokumen yang dibutuhkan}} \times 100$$

Contoh perhitungan:
Dokumen yang ada hanya bisa dilengkapi 7 dokumen
Nilai total dokumen = $(7 / 8) \times 100 = 87,5$
Nilai aspek kepatuhan = $30\% \times 87,5 = 26,25$
Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek kepatuhan sebesar 26,25

Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data

Kesesuaian Data dan Informasi		Kesesuaian Target		Kesesuaian Realisasi	
Perbandingan dokumen	Nilai max	Perbandingan dokumen	Nilai max	Perbandingan dokumen	Nilai max
PK ↓ Manual IKU	1 (A)	PK ↓ LKJ/LCK TW III	1 (E)	LKJ/LCK TW III ↓ KinerjaJaku	1 (H)
PK ↓ Rincian Target IKU	1 (B)	PK ↓ KinerjaJaku	1 (F)		
PK ↓ Rencana Aksi	1 (C)	LKJ/LCK TW III ↓ KinerjaJaku	1 (G)		
Rincian Target ↓ KinerjaJaku	1 (D)				

Nilai Aspek Kesesuaian = Bobot 30% X Rata-rata Kesesuaian

$$\text{Rata-rata Kesesuaian} = \frac{A+B+C+D+E+F+G+H}{8} \times 100$$

Contoh perhitungan:
Nilai perbandingan (A-H) yang diperoleh mendapat skor 7,8
Rata-rata kesesuaian = $(7,8 / 8) \times 100 = 97,5$
Nilai aspek kesesuaian = $30\% \times 97,5 = 29,25$
Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek kesesuaian sebesar 29,25

Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2020 pada aplikasi kinerjajaku.

Nilai Capaian IKU + IK Tw I	Nilai Capaian IKU + IK Tw II	Nilai Capaian IKU + IK Tw III
99,00 (A)	102,00 (B)	103,00 (C)

Nilai Aspek Ketercapaian = Bobot $40\% \left(\frac{\text{Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK}}{120} \times 100 \right)$

$$\text{Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK} = \frac{A+B+C}{3} \times 100$$

Contoh perhitungan:
Nilai Capaian IKU + IK yang diperoleh Tw I: 99, Tw II: 102, Tw III: 103
Rata-rata Nilai Capaian IKU + IK = $(99+102+103) / 3 = 101,33$
Nilai aspek ketercapaian = $40\% \times ((101,33 / 120) \times 100) = 33,78$
Sehingga nilai yang diperoleh pada aspek ketercapaian sebesar 33,78

B. **Nilai Rekon Kinerja** adalah skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi data kinerja.

ASPEK KEPATUHAN (30%)	ASPEK KESESUAIAN (30%)	ASPEK KETERCAPIAN (40%)
A-I	A-II	A-III
SKOR NILAI UNIT = A-I + A-II + A-III = XX,XX		

SKALA	
0 - 50	BURUK
>50 - 75	KURANG
>75 - 85	CUKUP
>85 - 90	BAIK
>90 - 100	SANGAT BAIK

Tabel 15. Capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP (nilai)

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 11	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPUPP (nilai)							
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
-	-	-	-	-	92	-	-	-

Untuk indikator nilai rekonsiliasi capaian akan ada di akhir tahun 2023 dengan target sebesar 92.

Indikator Kinerja 11

Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPPU-PP (%)

Sistem manajemen pengetahuan yang dimaksud dalam IKU ini adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah

ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Pemanfaatan teknologi informasi ini dinilai berdasarkan pemanfaatan aplikasi Bitrix 24 KKP dalam menyampaikan informasi berupa berita ataupun laporan kegiatan terkait riset maupun non riset. Pada Tahun 2023 IKU ini ditargetkan sebesar 92%.

IKU ini memiliki pengertian suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Tabel 16. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPPU-PP (%)

SS 3		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 11		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPPU-PP (%)							
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024				
	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
	100	92	100	108,70	-	92	108,70	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada triwulan I Tahun 2023 ini capaian indikator kinerja presentase Unit Kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan memiliki presentase capaian sebesar 108,70% yang mana dengan angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang ditetapkan, yaitu besar capaian 100% dengan target 92. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, Indikator ini tidak mengalami kenaikan karena realisasi triwulan 1 tahun 2023 sama dengan realisasi di triwulan yang sama di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna aplikasi bitrix telah menunjukkan keaktifan dalam melakukan posting atau sharing dan informasi dan kegiatan sehingga melebihi target yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 12

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

Definisi IKU ini yaitu Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon III lingkup BRSDM.

Bukti data dukungnya berupa Surat Capaian IKU Persentase jumlah rekomendasi dari BRSDM KP.

Tabel 17. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 12	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)							
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
-	75	75	100	-	75	100	-	-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada triwulan I Tahun 2023 ini capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) memiliki presentase capaian sebesar 100% yang mana dengan angka tersebut menunjukkan bahwa realisasi capaian telah melebihi target yang ditetapkan yaitu dengan target 75.

Indikator Kinerja 13

Nilai IKPA BRPPU-PP (nilai)

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiscal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu

Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

Tabel 18. Capaian IKU Nilai IKPA BRPPU-PP (nilai)

SS 3		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 13		Nilai IKPA BRPPU-PP (nilai)							
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024				
	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator Nilai IKPA BRPPU-PP (nilai) perhitungan nilainya pada semester I tahun 2023 dengan target sebesar 89.

Indikator Kinerja 14

Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)

Definisi IKU ini adalah Nilai serapan anggaran di tahun berjalan Berdasarkan target penyerapan anggaran tiap triwulan dengan formulasi sebagai berikut:

- Indikator penyerapan anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran pemerintah
- Target penyerapan tahun 2023 yakni 81%
- Kinerja penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggarannya, melainkan juga capaian output setiap K/L, dan dilakukan secara efisien dan efektif
- Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik

Bukti capaian IKU ini berupa Laporan Hasil pengolahan data pada aplikasi SMART DJA berupa Nilai Kinerja Anggaran BRPPUPP pada akhir tahun.

Tabel 19. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker								
IKU 14	Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)								
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024				
	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, Nilai NKA BRPPU-PP (nilai) capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2023 dengan target sebesar 82.

Indikator Kinerja 15

Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)

Definisi iku ini yaitu Kemitraan adalah suatu kerja sama formal yang saling menguntungkan antara Satuan Kerja BRPPU-PP dengan pihak eksternal KKP (dalam dan luar negeri) untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip bersama. Bentuk kemitraan diantaranya di bidang pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan pemanfaatan BMN Satuan Kerja BRPPU-PP.

Dasar Hukum:

PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada KKP

PMK Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan BMN

Permen KP Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerjasama dan Perjanjian

Bukti data dukungnya yaitu berupa:

1. Naskah Perjanjian Kemitraan yang disepakati kedua belah pihak diantaranya: Perjanjian Sewa Menyewa , Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (BMN), Perjanjian Bangun Guna Serah, Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, dan Perjanjian Kerjasama di bidang pengembangan SDM KP, dll
2. Laporan Kegiatan Kemitraan

Tabel 20. Capaian IKU Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)

SS 3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 15	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)							
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
2022	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan) capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2023 dengan target sebanyak 1.

Indikator Kinerja 16

Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP(%)

Layanan dukungan manajemen merupakan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRPPUPP berupa penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang perikanan.

Dokumen layanan dukungan manajemen dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll.

- Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.
- Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

Formula :

$$\text{Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen Hasil Layanan}}{\text{Jumlah Target Dokumen Hasil Layanan}} \times 100\%$$

Tabel 21. Capaian IKU Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPUPP(%)

SS 5		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker							
IKU 15		Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategis lainnya BRPPUPP							
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024				
	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024	% Capaian Thd target 2024
	100	100	100	100	0	100	100	-	-

Untuk indikator ini, realisasi yang dicapai pada triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 100% dengan jumlah target yang sama. Sehingga persentase capaian yang didapatpun sebesar 100%.

Indikator Kinerja 17

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)

Layanan Dukungan Manajemen Internal meliputi antara lain layanan perencanaan dan penganggaran internal, layanan umum, layanan hukum, layanan organisasi dan tata kelola internal, layanan kehumasan dan protokoler, layanan data dan informasi, layanan monev (termasuk pelaporan), pengelolaan keuangan dan kinerja internal, dan layanan perkantoran.

d. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

e. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.

f. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

Formula :

$$\text{Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Dokumen Hasil Layanan}}{\text{Jumlah Target Dokumen Hasil Layanan}} \times 100\%$$

Tabel 22. Capaian IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)

SS 3		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 dan Satker						
IKU 17		Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)						
Realisasi TW I	TRIWULAN I TAHUN 2023				RENSTRA BRPPUPP 2020-2024			
	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% kenaikan 2022-2023	Target 2023	% capaian terhadap Target 2023	Target 2024
100	100	100	100	-	100	100	-	-

Berdasarkan tabel diatas persentase layanan dukungan manajemen internal BRPPUPP sampai dengan triwulan I tahun 2023 telah mencapai realisasi sebesar 100% dimana angka tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa capaian dokumen layanan dukungan manajemen yang dihasilkan dari kegiatan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data, diseminasi, publikasi, keuangan, pengelolaan aset, kepegawaian, dll. pada Tahun 2023 telah terpenuhi.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran BRPPUPP sampai dengan 31 Maret 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 23. Realisasi Anggaran BRPPUPP Tahun 2023

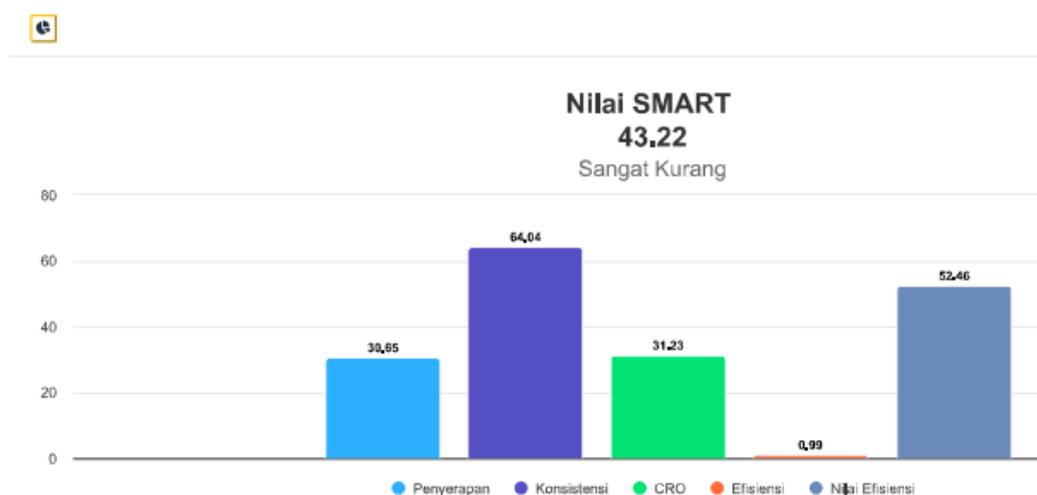
KODE	OUTPUT	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI	%
2375	PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		9,908,460,000	1,612,513,507	16.27
2375.QJA.001	Teknologi Kelautan dan Perikanan yang diuji Kelayakannya	3 Produk	1,500,000,000	0	0
2375.QDD.001	Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dari penyuluh KP	5.600 Kelompok	7,908,460,000	1,601,958,507	20.26
2375.QDD.002	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang mendapatkan percontohan penyuluhan	1 produk	500,000,000	10,555,000	2.11
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan		70,248,329,000	17,434,437,756	24.82
2378.EBA.956	Layanan BMN	1 Layanan	21,650,000	6,651,767	30.72
2378.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	46,743,000	4,584,000	9.81
2378.EBA.962	Layanan Umum	1 Layanan	336,286,000	91,725,518	27.28
2378.EAA.994	Layanan Perkantoran	1 layanan	69,554,565,000	17,298,105,306	24.87
2378.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	53 Orang	73,340,000	8,550,000	11.6
2378.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	82,035,000	20,085,940	24.48
2378.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	103,710,000	4,735,225	4.57
2378.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	30,000,000	0	0
	TOTAL		80,156,789,000	19,046,951,263	23.76

Sumber : data realisasi, aplikasi SAKTI per tgl 31 Maret 2023

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumberdaya BRPPUPP Tahun 2022

Efisiensi adalah cara untuk mencapai hasil maksimal dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud adalah waktu, tenaga (sumberdaya manusia) dan biaya (anggaran). Suatu pekerjaan dinilai efisien apabila sumber daya (input) yang digunakan sedikit, namun mampu menghasilkan keluaran (output) sesuai dengan rencana atau harapan.

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi, data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA dimana pengisian aplikasi ini dilakukan secara simultan setiap awal bulan.



Gambar 4. Nilai Efisiensi BRPPUPP pada aplikasi SMART DJA

Tabel 24. Efisiensi Anggaran BRPPUPP Tahun 2022

Capaian Realisasi Output	Serapan Anggaran	Konsistensi Serapan Anggaran	Efisiensi	Nilai Efisiensi
31,23	30,65	64,04	0,99	52,46

Berdasarkan gambar dan tabel diatas, Efisiensi anggaran BRPPUPP pada triwulan I Tahun 2023 memperoleh skor 0,99 dengan Nilai Efisiensi sebesar 52,46. Efisiensi anggaran

menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai dengan -20. Kondisi ini dipengaruhi beberapa hal antara lain:

1. Realisasi anggaran pada posisi 30,65% dengan tingkat output kegiatan mencapai 31,23%.
2. Terdapat beberapa output dengan pencapaian sama dengan atau lebih besar dari 100%, seperti:
 - A. Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP sebesar 110,11%
 - B. Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP sebesar 120%
 - C. Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BRPPUPP sebesar 120%
 - D. Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar sebesar 116,28%

Pencapaian nilai efisiensi sebesar 0,99 diawal tahun menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran pada triwulan I tahun 2023 terdapat efisiensi baik efisiensi penggunaan anggaran yang juga didukung oleh sumberdaya lainnya seperti sumberdaya manusia dan asset yang dimiliki dalam rang pencapaian target output triwulan 1 tahun 2023. Tentu saja kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran di triwulan berikutnya hingga diakhir tahun sehingga capaian kinerja pada akhir tahun dapat tercapai.

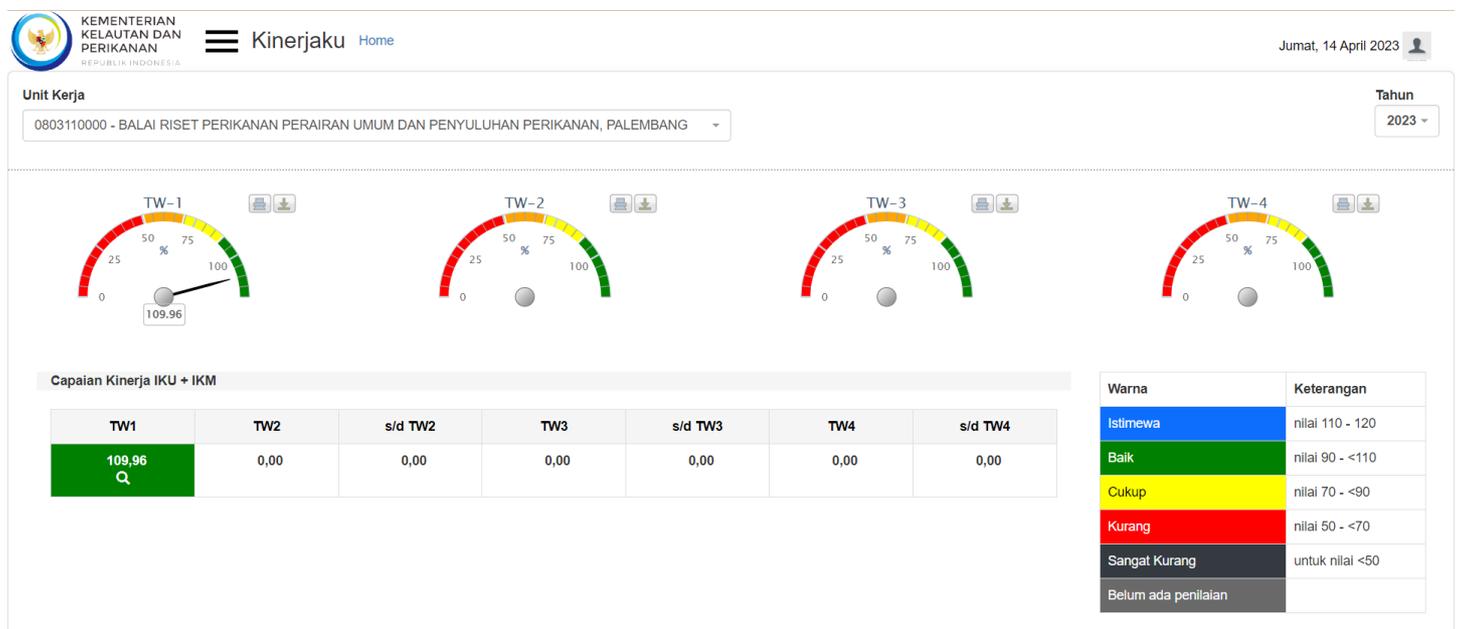
BAB IV PENUTUP

01 — Capaian Kinerja Utama

02 — Permasalahan dan Rekomendasi

4.1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BRPPUPP tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced score card dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BRPPUPP di tingkat korporat Tahun 2023 sebesar 109,96% per 14 April 2023, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 5. Dashbord Kinerja Triwulan I Tahun 2023 BRPPUPP

Selama Triwulan I tahun 2023, dari 17 IKU BRPPUPP, terdapat 8 IKU berstatus hijau, IKU yang telah ada capaiannya adalah:

1. Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BRPPUPP tercapai sebanyak 991 kelompok dari target triwulan I tahun 2023 yang ditetapkan sebanyak 900 kelompok dengan persentase sebesar 110,11%.
2. Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (kelompok) tercapai 2 kelompok dari target triwulan I tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 0 kelompok dengan persentase sebesar 120,00%.

3. Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di satminkal BRPPUPP (kelompok) tercapai 128 kelompok dari target triwulan I tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 100 kelompok dengan persentase sebesar 120%.
4. Nilai PNBP BRPPU-PP (Rupiah Miliar) dengan capaian di Triwulan I sebesar Rp10.709.300,- dengan target di tahun 2023 sebanyak Rp27.000.000,-, dengan persentase sebesar 100%
5. Persentase unit kerja BRPPUPP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tercapai sebesar 100% dengan target triwulan I tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 92% dengan persentase sebesar 108,70%
6. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) dengan capaian sebesar 75% dengan persentase 100%
7. Persentase dukungan manajemen teknis dan kegiatan strategi lainnya BRPPU-PP (%) tercapai sesuai dengan target triwulan I tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 100%.
8. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%) tercapai sesuai dengan target triwulan I tahun 2023 yang ditetapkan yaitu 100%.

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Permasalahan yang terjadi pada tahun 2023 yaitu:

1. Kegiatan perkantoran masih berjalan dengan baik, namun terdapat perubahan target PNBP dan masih dalam tahap menunggu SOTK balai yang terbaru.

Secara umum Kinerja BRPPUPP pada triwulan I tahun 2024 berjalan dengan baik, namun demikian untuk memastikan capaian kinerja dapat tercapai dengan maksimal pada triwulan berikutnya perlu dilakukan beberapa rekomendasi antara lain:

- i. Terkait perubahan SOTK telah dilakukan koordinasi dan mengikuti rapat pembahasan SOTK terbaru lingkup BRSDM.
2. Untuk target PNBP yang berubah, perlu dilakukan revisi PNBP

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513278
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezki Antoni S
Jabatan : Pjt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : Yayan Hikmayani
Jabatan : Kepala Pusat Riset Perikanan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

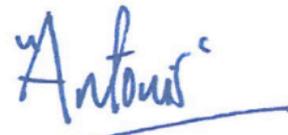
Pihak kesatu akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Perikanan

Pihak Kesatu
Pjt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan


Yayan Hikmayani


Rezki Antoni S

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	1	Nilai PNBP BRPPU-PP (Rupiah Milyar)	0,027
		2	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BRPPU-PP dibandingkan Realisasi Anggaran BRPPU-PP TA 2022 (%)	≤0,5
		3	Indeks Profesionalitas ASN BRPPU-PP (indeks)	78
		4	Nilai PM SAKIP BRPPU-PP (nilai)	76
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BRPPU-PP (nilai)	92
		6	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar BRPPU-PP (%)	92
		7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan BRPPU-PP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		8	Nilai IKPA BRPPU-PP (nilai)	89
		9	Nilai Kinerja Anggaran BRPPU-PP (nilai)	82
		10	Kemitraan yang disepakati dan/atau ditindaklanjuti BRPPU-PP (kemitraan)	1
				11

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	15.124.592.000
Total Anggaran Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Tahun 2023		15.124.592.000

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Perikanan


 Yayan Hikmayani

Pihak Kesatu
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan


 Rezki Antoni S



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rezki Antoni S**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Kepala Pusat Pelatihan dan
Penyuluhan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan
Umum dan Penyuluhan Perikanan

Rezki Antoni S

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN
PENYULUHAN PERIKANAN

KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	5.600
		2	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	250
		3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	306
		4	Tenaga kerja yang terlibat lingkup BRPPUPP (orang)	1.068
2	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	5	Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Satminkal BRPPUPP (kelompok)	4
3	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	6	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal BRPPUPP (%)	100

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	9.908.460.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP	55.123.737.000
Total Anggaran Penyuluhan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan		65.032.197.000

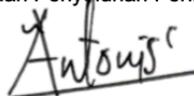
Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan



Lilly Aprilia Pregiawati

Pihak Pertama
Plt. Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan



Rezki Antoni S

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
JALAN GUBERNUR H. A. BASTARI NOMOR 08, JAKABARING-PALEMBANG
TELEPON: (0711) 5649600 FAKSIMILE (0711) 5469601
LAMAM: www.bp3upalembang.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK persuratanbrppupp@kkp.go.id

SURAT PERINTAH
KEPALA BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN
NOMOR : K.27 /BRSDM-BRPPUPP/TU.110/I/2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj) TRIWULAN DAN TAHUNAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan institusi pemerintah (SAKIP) dalam rangka tata pemerintahan yang baik sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara maka perlu adanya Laporan Kinerja (LKj);

b. bahwa untuk mendukung SAKIP tersebut maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Triwulan Dan Tahunan.

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1694);



1

MEMBERI PERINTAH

- Kepada : Pegawai Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan sesuai daftar nama terlampir.
- Untuk :
- a. Menunjuk pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam surat perintah ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Triwulan Dan Tahunan
 - b. Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) sebagaimana dimaksud huruf a di dalamnya terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 - c. Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan Dan Tahunan BRPPUPP sebagaimana dimaksud pada huruf b mempunyai tugas:
 1. Penanggung Jawab, bertugas:
Memberikan arahan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) serta penilaian mandiri SAKIP BRPPUPP.
 2. Ketua, bertugas:
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) serta penilaian mandiri SAKIP BRPPUPP, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Pembina dan unit kerja di atas BRPPUPP.
 3. Sekretaris, bertugas:
Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) serta penilaian mandiri SAKIP BRPPUPP.
 4. Anggota, bertugas:
 - a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan dan bukti capaian serta menyusun Laporan Kinerja (LKj) dan penilaian mandiri SAKIP BRPPUPP.
 - b. Melakukan pembaruan masukan data serta rekonsiliasi pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja yang ada.
 - c. Melakukan penilaian mandiri SAKIP dan pengumpulan bahan dan bukti capaian dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRPPUPP.
 - d. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Tim Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRPPUPP bertanggung jawab kepada Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
 - e. Tim penyusun Laporan Kinerja (LKj) BRPPUPP mengikuti jadwal dan arahan dari instansi unit kerja eselon di atas BRPPUPP terkait penyusunan Laporan Kinerja.
 - f. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya surat perintah ini, dibebankan kepada anggaran satuan kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.
 - g. Surat perintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 03 Januari 2022
Kepala Balai,


Zulkarnaen Fahmi

Lampiran Surat Perintah
Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum
dan Penyuluhan Perikanan
Nomor : **27**/BRSDM-BRPPUPP/TU.110/I/2022
Tanggal : **03** Januari 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA (LKj)
TRIWULAN DAN TAHUNAN
BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

No	Nama	Jabatan di BRPPUPP	Jabatan
1.	Zulkarnaen Fahmi, S.Pi., M.Si	Kepala BRPPUPP	Penanggung Jawab
2.	Rezki Antoni S, S.Kel	Subkoordinator Kelompok Tata Operasional	Ketua
3.	Muthia Nurlestari Putri, S.Pi	Pelaksana Koordinasi Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris
4.	Rully Ismanto, S.Si	Kasubbag Umum	Anggota
5.	Acim Tirtana, SE	Pelaksana Koordinasi Program dan Anggaran	Anggota
6.	Irsan, ST	Staf Pelaksana Monitoring dan Evaluasi	Anggota
7.	Rian Ariadi Harahap, S.AP	Staf Pelaksana Program dan Anggaran	Anggota
8.	Arismansyah, S.Pi	Staf Pelaksana Monitoring dan Evaluasi	Anggota

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal **03** Januari 2022

Kepala Balai



Zulkarnaen Fahmi



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**
REPUBLIK INDONESIA

BRPPUPP - PALEMBANG

 (0711) 5649600

 Jl. Gub. H. Bastari No 8, Jakabaring, Palembang

 brppupp_palembang

 www.bp3upalembang.kkp.go.id